



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Muara Enim Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp2.589.697.158.666,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp249.627.428.908,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.822.185.442,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.677.564.208,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.153.201.474,00
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.974.477.784,00

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.822.185.442,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan berdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.104.437.576,00

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.133.215.853,00
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.209.312,00
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp577.750.752,00
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.744.941.738,00
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp446.003.262,00
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.082.000,00
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.935.454.356,00
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.565.155.415,00
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp10.961.935.178,00

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.677.564.208,00 yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.955.190.150,00
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.267.271.558,00
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.455.102.500,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.153.201.474,00 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara; dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.406.760.604,00
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.746.440.870,00

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.974.477.784,00 yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - d. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (1) Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.233.758,00
- (2) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.950.000.000,00
- (3) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp242.110.400,00

- (4) Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.621.133.626,00

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.332.185.274.894,00 yang terdiri atas:
- Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.411.349.600,00
- (3) Anggaran pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.773.925.294,00

Pasal 10

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.884.454.864,00 yang terdiri atas:
- pendapatan hibah ; dan
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.170.000.000,00
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.714.454.864,00

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.775.918.642.534,00 yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) huruf a direncanakan sebesar Rp2.013.914.659.729,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.160.692.967.923,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp796.374.943.787,00
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.003.948.019,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.842.800.000,00

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.160.692.967.923,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.209.761.095,00
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.115.720.331,00
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.034.308.485,00
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.965.854.300,00
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.086.203,00
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.577.191.304,00

Pasal 14

- (1) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.533.175.315,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok;
 - b. belanja tunjangan keluarga;
 - c. belanja tunjangan jabatan;
 - d. belanja tunjangan fungsional;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum;
 - f. belanja tunjangan beras;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus;
 - h. belanja pembulatan gaji;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian.

- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.279.603.760,00
- (3) Belanja tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.302.552.856,00
- (4) Belanja tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.590.546.464,00
- (5) Belanja tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.267.722.192,00
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.114.103.823,00
- (7) Belanja tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.173.642.931,00
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.975.227.539,00
- (9) Belanja pembulatan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.610.807,00
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.117.154.423,00
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.092.626.700,00.
- (12) Belanja iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.277.969.600,00

Pasal 15

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023, yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.000.000.000,00 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp240.000.000.000,00

Pasal 17

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.000.000.000,00 yang terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp240.000.000.000,00

Pasal 18

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) direncanakan sebesar Rp240.000.000.000,00 yang terdiri atas Penghematan belanja operasional.
- (2) Penghematan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp240.000.000.000,00

Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.778.516.132,00 yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah; dan
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.278.516.132,00

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp186.221.483.868,00
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp186.221.483.868,00

Pasal 21

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil

- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Alam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Muara Enim ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 59

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.627.428.908
4.1.01	Pajak Daerah	78.822.185.442
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.104.437.576
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.104.437.576
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.104.437.576
4.1.01.07	Pajak Restoran	11.133.215.853
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.133.215.853
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	11.133.215.853
4.1.01.08	Pajak Hiburan	292.209.312
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.073.500
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.073.500
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	217.129.506
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	217.129.506
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.551.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.551.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	65.455.306
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	65.455.306
4.1.01.09	Pajak Reklame	577.750.752
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	461.858.064
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	461.858.064
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	95.996.500
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	95.996.500
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	19.146.188

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	19.146.188
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	750.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	750.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	26.744.941.738
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.744.941.738
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.744.941.738
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	446.003.262
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	446.003.262
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	446.003.262
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	61.082.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	61.082.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	61.082.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.935.454.356
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	13.935.454.356
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	13.935.454.356
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.565.155.415
4.1.01.15.01	PBBP2	12.565.155.415
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	12.565.155.415
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.961.935.178
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.785.790.980
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.785.790.980
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.176.144.198
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.176.144.198
4.1.02	Retribusi Daerah	7.677.564.208

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.955.190.150
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	44.957.150
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	44.957.150
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.320.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.320.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	409.903.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	409.903.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.309.440.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	176.400.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	456.240.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	676.800.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	306.050.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	306.050.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	59.500.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	59.500.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.020.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	30.020.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	545.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	545.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.267.271.558
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	743.085.558
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	190.500.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	430.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	122.585.558

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	115.160.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	115.160.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	3.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	3.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	64.200.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	64.200.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	221.826.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	221.826.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	120.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	120.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.455.102.500
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.455.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.455.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.000.102.500
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	2.000.102.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.153.201.474
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	19.406.760.604
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	19.406.760.604
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	19.406.760.604
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.746.440.870
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.746.440.870
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.746.440.870
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133.974.477.784
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	161.233.758

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	19.833.758
4.1.04.01.01.0002	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	19.833.758
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	103.000.000
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	95.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	38.400.000
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	38.400.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.950.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.750.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.750.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	242.110.400
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	950.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	950.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	100.000.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500.000
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	500.000
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	23.000.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	17.000.000
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	3.000.000
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.500.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.500.000
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	150.000
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	150.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.500.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.500.000
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	10.400
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	10.400
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	5.000.000
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	110.000.000
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	70.000.000
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	40.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	130.621.133.626
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	130.621.133.626
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	130.621.133.626
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.332.185.274.894
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.187.411.349.600
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.971.438.100.600
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.095.587.132.600
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	452.786.782.500
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	54.721.064.300
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.330.403.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	11.058.110.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	50.307.647.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	7.493.188.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	7.297.873.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	505.498.993.400
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.833.130.400
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	627.992.666.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	627.992.666.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	247.858.302.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	91.422.300.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	113.806.511.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.601.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.822.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.526.700.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	20.028.191.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	502.985.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.713.604.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	374.435.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	252.300.000
4.2.01.05	Dana Desa	215.973.249.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	215.973.249.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	215.973.249.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.773.925.294
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144.773.925.294
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	144.773.925.294
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.642.037.177
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.383.338.823
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.940.743.164
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	882.346.647
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26.925.459.483
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.884.454.864
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.170.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.170.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.170.000.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.170.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.714.454.864
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	6.714.454.864
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	6.714.454.864
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	6.714.454.864
	Jumlah Pendapatan	2.589.697.158.666
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	2.013.914.659.729
5.1.01	Belanja Pegawai	1.160.692.967.923
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	635.209.761.095
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	455.279.603.760

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	359.333.744.769
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	95.945.858.991
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	47.302.552.856
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.912.693.774
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.389.859.082
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.590.546.464
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.590.546.464
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.267.722.192
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.110.215.067
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	157.507.125
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	11.114.103.823
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.135.900.916
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.978.202.907
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	28.173.642.931
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.667.721.115
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.505.921.816
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.975.227.539
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.763.559.307
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	211.668.232
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.610.807
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.579.528
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.031.279
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	48.117.154.423

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	37.272.894.702
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	10.844.259.721
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.092.626.700
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	862.356.500
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	230.270.200
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.277.969.600
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.587.159.300
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	690.810.300
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	299.115.720.331
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	276.429.446.593
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	226.337.393.505
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.092.053.088
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.776.700.934
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.526.907.944
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	249.792.990
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.909.572.804
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.909.572.804
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.034.308.485
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.719.189.274
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	105.221.879
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	556.660.793
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	14.610.466
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	28.887.538
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.337.247.087

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	22.300.163
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.054.100
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	696.772.718
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	506.337.771
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	448.096.759
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	383.878.211
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.247.858
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.516.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.495.150
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	65.472.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	15.302.500
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2.975.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.501.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	27.250.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	36.554.278
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	5.758.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.210.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.091.300
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	72.750.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	6.000.000
5.1.01.03.02.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	750.000
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	100.005.125
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	113.806.511.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	113.806.511.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.601.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.601.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.961.230.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.152.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	809.230.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	562.500.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	562.500.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35.965.854.300
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.032.580.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.032.580.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.481.200
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.481.200
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.841.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.841.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	139.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	139.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.272.322.300
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	110.322.300
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.800.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.200.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	12.150.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.530.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.530.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.086.203
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.153.915
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.153.915
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359.601
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359.601
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489.256
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489.256

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.835
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.577.191.304
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.184.071.304
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.184.071.304
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	61.616.046.205
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	61.616.046.205
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	61.616.046.205
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796.374.943.787
5.1.02.01	Belanja Barang	174.457.132.548
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	174.159.130.548
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	493.150.289
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	612.613.028
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.916.744.263
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	211.692.922
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	46.000.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	99.062.100
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	195.289.400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.985.582.499
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.338.724.962
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.637.100
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	112.608.321

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.009.500
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.347.291.230
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.115.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.320.920.829
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	389.423.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	185.022.890
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.108.401.254
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.001.217.750
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	93.331.550
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	275.493.600
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	232.701.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.635.871.781
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.708.294.200
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	80.838.654.317
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.642.136.875
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	715.632.584
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	95.885.300
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	2.820.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.558.690.370
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	102.322.480
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	15.850.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	580.600.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.693.579.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	18.073.800
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	227.403.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	60.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.027.307.500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	644.996.090
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	214.216.500
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	48.170.200
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	70.650.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.910.200
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	653.200.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	620.363.922
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	529.988.242
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	1.433.580.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	298.002.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	298.002.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	323.899.353.815
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	195.193.869.124
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.211.396.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.737.820.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	354.280.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	14.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	67.170.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	648.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	28.996.100.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.384.202.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	521.232.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.148.000.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.005.860.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.873.120.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	303.450.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.403.550.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	420.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.058.550.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.309.620.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	535.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.507.440.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	11.262.620.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.748.560.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.963.953.500
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.655.855.343
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.204.830.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	108.930.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	476.700.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	26.900.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	469.140.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	272.450.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	571.184.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	130.000.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	5.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.040.170.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	933.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	360.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	88.692.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.012.710.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	22.400.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	124.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.070.380.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	874.073.840
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.172.930.573
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.327.604.029
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.640.035.710
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.920.062.200
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	121.577.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.047.020.929
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	21.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	14.700.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	87.322.131.231
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.470.665.424

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	73.732.680.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	840.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	194.688.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.500.825.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.583.272.807
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	18.000.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	18.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.966.830.515
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	2.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	74.650.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.255.534.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	105.200.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.415.446.495
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	25.250.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	28.750.020
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.465.408.180
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	66.754.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.422.493.510
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	9.538.160.670
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	288.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.357.479.765

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.724.801.890
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.605.500.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	2.090.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.751.677.875
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	85.500.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	910.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	20.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	90.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	800.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.263.985.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.873.790.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5.606.030.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.784.165.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	301.650.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	301.650.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.283.489.050
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.342.974.570
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	10.381.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	335.516.974
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	8.045.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	5.373.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	101.666.435
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.642.022.212
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.224.630.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	28.466.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	308.280.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	116.736.200
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	274.000.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	147.910.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	36.707.608
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	256.800.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	999.063.941
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	249.470.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	60.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	428.411.700
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	100.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	535.342.900
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	396.151.600
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.000.000
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	72.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.019.614.480
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.890.178.800
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	29.988.000
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.500.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50.000.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.947.680
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	440.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	400.000.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	140.000.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	35.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.895.900.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	500.000.000
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	250.000.000
5.1.02.03.04.0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.000.000.000
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	50.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	95.900.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	25.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	137.767.993.028
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	137.767.993.028
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137.767.993.028
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.628.660.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.404.600.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.482.200.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	70.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.852.400.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.224.060.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.224.060.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.049.257.710

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.049.257.710
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.049.257.710
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.289.057.636
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.289.057.636
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.289.057.636
5.1.03	Belanja Bunga	6.000.000.000
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.000.000.000
5.1.03.04.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	6.000.000.000
5.1.03.04.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	6.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	48.003.948.019
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.955.872.011
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.770.284.814
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.567.046.814
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	203.238.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.185.587.197
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.711.622.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.473.965.197
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10.368.894.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.368.894.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.368.894.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.679.182.008
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.679.182.008
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.679.182.008
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.842.800.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.842.800.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.842.800.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.842.800.000
5.2	BELANJA MODAL	339.940.306.159
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.750.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.750.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.500.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.500.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	250.000.000
5.2.01.01.03.0002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	250.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.882.404.387
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	987.500.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	950.000.000
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	950.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	37.500.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	37.500.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.128.575.610
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	15.128.575.610
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.897.115.610
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	677.460.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	650.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	100.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.764.000.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	40.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	40.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	40.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	811.822.800
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	811.822.800
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	508.095.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	303.727.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.445.880.605
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.878.379.163
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	381.665.535
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	963.561.948
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.533.151.680
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.490.014.442
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.349.916.645
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	30.250.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.558.438.057
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.437.301.740
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	114.108.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	77.487.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	77.487.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	711.672.546
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	201.907.746
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	23.700.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	178.207.746

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	81.764.800
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	81.764.800
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	428.000.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	428.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.475.081.232
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.475.081.232
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.534.500.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	6.100.000
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.280.000.000
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	3.061.387.232
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.593.094.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	832.602.065
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	25.969.300
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	25.969.300
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.500.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	2.500.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	804.132.765
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	197.737.065
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	550.021.500
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	56.374.200
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.104.133.684
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.157.825.995
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.157.825.995
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.946.307.689

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.715.534.689
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	230.773.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	96.368.500
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	96.368.500
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	96.368.500
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	590.203.760
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	590.203.760
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	174.000.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	416.203.760
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	241.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	241.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	241.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.862.533.800
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.862.533.800
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	10.862.533.800
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.555.029.785
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.555.029.785
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.555.029.785
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.925.390.155
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	68.359.570.155
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.986.106.155
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	17.789.074.294
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	17.406.975.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.389.210.500
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	200.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.688.000.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	115.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	350.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	150.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	235.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.415.966.861
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	434.100.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.462.779.500
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.150.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	373.464.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	373.464.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.404.820.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	8.404.820.000
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	380.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	8.024.820.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.161.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.161.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.161.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.664.806.127
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	116.252.958.500
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	92.352.958.500
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	83.130.000.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	625.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	8.597.958.500
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	23.900.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	23.900.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	52.494.678.316
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.600.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.600.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	31.872.963.316
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	14.275.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	17.597.963.316
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2.350.000.000
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	2.350.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.671.715.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	7.671.715.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.917.169.311
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.917.169.311
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.917.169.311
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.717.705.490
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000
5.2.05.01.06	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	200.000.000
5.2.05.01.06.0001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	200.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	178.810.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	178.810.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	178.810.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	241.600.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	241.600.000
5.2.05.08.01.0003	Belanja Modal Hak Cipta	12.000.000
5.2.05.08.01.0004	Belanja Modal Hak Paten	18.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	60.000.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	151.600.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	9.097.295.490
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	9.097.295.490
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	9.097.295.490
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	407.063.676.646
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.649.974.965
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.882.218.544
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.882.218.544
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.882.218.544
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	767.756.421

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	767.756.421
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	767.756.421
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.413.701.681
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	398.413.701.681
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	394.173.249.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	394.173.249.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.240.452.681
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.240.452.681
	Jumlah Belanja	2.775.918.642.534
	Total Surplus/(Defisit)	(186.221.483.868)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	240.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	240.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	240.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	240.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	240.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	240.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	53.778.516.132
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17.500.000.000

KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	17.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6.278.516.132
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	53.778.516.132
	Pembiayaan Netto	186.221.483.868
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. Bupati Muara Enim

Kurniawan

